



**STRATEGI KOMUNIKASI CALON LEGISLATIF MUDA PADA PEMILU
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024**

*Communication Strategy for Young Legislative Candidates in the 2024
Banyuwangi District DPRD Election*

Izzul Haque Ash Shiddiqi¹, Leni Vitasari², Hary Priyanto³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹Email: diqiizzul@gmail.com

²Email: lenivitasari76@gmail.com

³Email: harysangabi@gmail.com

Abstract

Political communication strategy for young legislator candidates in the 2024 Banyuwangi Regency Regional People's Representative Council (DPRD) General Election to gain political legitimacy in the form of support and voting on election day. Young legislator candidates implement various patterns, including direct political outreach to the community, forming work teams or volunteers to carry out activities with the community, installing props, and contributing in the form of providing assistance according to community needs. This research using a qualitative approach aims to find out, describe and analyze the communication strategies implemented by young legislator candidates in the 2024 Banyuwangi Regency DPRD elections in order to gain public legitimacy. Based on the analysis of research findings, an effective political communication strategy through a systematic persuasive approach has the potential to open up opportunities for victory. Recommendations for innovative political communication by young legislative candidates are tailored to aspects: communication sources, communication messages, supporting channels or media, who is the target or recipient of political communication, and the effect of communication in the 2024 election contestation.

Keywords: Political Communication, Young Politicians, 2024 Election

Abstrak

Strategi komunikasi politik calon legislator muda pada Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 demi mendapat legitimasi politik dalam bentuk dukungan dan pemberian suara pada hari pelaksanaan Pemilu. Berbagai pola dilakukan calon legislator muda, diantaranya sosialisasi politik secara langsung pada masyarakat, membentuk tim kerja atau relawan untuk berkegiatan bersama masyarakat, pemasangan alat peraga, hingga berkontribusi dalam bentuk pemberian bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 agar mendapat legitimasi masyarakat. Berdasarkan analisis temuan penelitian, strategi komunikasi politik yang efektif melalui pendekatan persuasif yang sistematis berpotensi membuka peluang kemenangan. Rekomendasi komunikasi politik inovatif oleh calon legislator muda disesuaikan pada aspek: sumber komunikasi, pesan komunikasi, saluran atau media pendukung, siapa sasaran atau penerima komunikasi politik, dan efek komunikasi dalam kontestasi Pemilu 2024.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Politisi Muda, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, setiap masyarakat yang ingin terlibat dalam lembaga pemerintahan, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, dari tingkat kabupaten hingga pusat, perlu melalui prosedur Pemilu. Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu untuk memilih presiden-wakil presiden, DPRD tingkat kabupaten dan provinsi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepala daerah-wakil kepala daerah tingkat kabupaten dan provinsi.

Persaingan politik antar kelompok masyarakat di Banyuwangi sering terlihat menjelang Pemilu untuk legislatif (DPRD) tingkat Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut karena ada minat besar dari berbagai unsur masyarakat Banyuwangi untuk menjadi anggota (legislator) DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Alokasi kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi yang diperebutkan dalam Pemilu 2024 sejumlah 50 kursi. Sebagaimana Ayat 3 (g) pada Pasal 8 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2022, tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, yang mengatur jumlah kursi sesuai jumlah penduduk, bahwa jumlah penduduk kabupaten/kota lebih dari 1.000.000 orang hingga 3.000.000 orang mendapat alokasi 50 kursi. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 mencapai 1.762.181 orang.

Tabel 1. Data Penduduk Kabupaten Banyuwangi

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan	864.124	869.655	876.128	875.670	882.590
Laki-laki	864.124	876.020	878.591	875.108	879.591
Jumlah Total	1.735.846	1.745.675	1.754.719	1.750.778	1.762.181

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Data per 7 Maret 2023)

Berdasarkan Ketetapan KPU Kabupaten Banyuwangi, pemilih pada Pemilu 2024 sejumlah 1.341.678 orang.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Di Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilu 2024

Pemilih	Jumlah
Perempuan	667.366
Laki-laki	674.312
Jumlah Total	1.341.678

Sumber: KPU Kabupaten Banyuwangi (2024)

Pemilih sejumlah 1.341.678 tersebut tersebar di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi yang terklasifikasi dalam 8 daerah pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

Tabel 3. Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi Pemilu Tahun 2024

Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Kecamatan
Banyuwangi 1	6	Kabat, Glagah, Banyuwangi
Banyuwangi 2	6	Srono, Rogojampi, Blimbingsari
Banyuwangi 3	6	Tegaldlimo, Muncar
Banyuwangi 4	7	Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Siliragung
Banyuwangi 5	6	Cluring, Gambiran, Tegalsari
Banyuwangi 6	7	Genteng, Glenmore, Kalibaru



Banyuwangi 7	6	Singojuruh, Songgon, Sempu
Banyuwangi 8	6	Giri, Wongsorejo, Kalipuro, Licin
Total	50 Kursi	

Sumber: Sumber: KPU Kabupaten Banyuwangi (2023)

Setiap calon anggota anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi bekerja keras untuk lolos atau menang. Berbagai taktik dan strategi digunakan untuk mendapat dukungan pemilih, khususnya saat kampanye. Menggunakan suatu strategi sama halnya merencanakan segala situasi yang mungkin terjadi pada tiap tindakan yang akan diambil atau dipilih agar mencegah segala kemungkinan yang buruk (Gunanto, et al., 2021).

Komunikasi politik merupakan salah satu strategi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga dapat memenangkan kontestasi politik dalam Pemilu tahun 2024. Berbagai model komunikasi politik dilakukan melalui sosialisasi langsung, memasang baliho di tempat strategis, hingga menyebarkan stiker yang berisi foto dan materi kampanye. Semua itu sebagai upaya untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada masyarakat dengan tujuan mendapat citra positif dalam bentuk dukungan suara pemilih.

Mengatasi pola pikir konvensional masyarakat memerlukan perencanaan komunikasi yang efektif (Yuniar, et al., 2024). Calon legislator muda perlu mengetahui kondisi sosial masyarakat sehingga dapat membuat program yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga berdampak perolehan dukungan dan suara.

Keberadaan calon legislator muda sering mengalami kendala. Keberadaannya dianggap belum teruji memberi kepercayaan masyarakat. Pentingnya komunikasi secara simultan karena komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang sesuai dengan keinginan komunikator (Priyanto, 2023). Calon legislator muda harus mampu meyakinkan masyarakat dengan program yang ditawarkan sehingga mau mendukung dan memilihnya.

Penelitian tentang komunikasi politik calon legislator muda banyak dilakukan namun sedikit yang menganalisis berdasarkan aspek: sumber, pesan, saluran, sasaran, dan efek komunikasi. Syahrudin, et al. (2023), dalam penelitiannya berjudul: Strategi Komunikasi Politik Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilu 2019, mengungkapkan strategi komunikasi politik yang dilakukan legislator terpilih di Kota Kendari tidak hanya menentukan strategi politik pesaing tapi berdampak pada perolehan suara partai.

Penelitian yang dilakukan Syamsuar & Andini (2020), dengan judul: Militansi Caleg Muda dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat, mengemukakan tidak semua calon legislator muda Dapil 1 Aceh Barat yang ikut dalam Pemilu tahun 2019 memiliki strategi komunikasi politik yang matang. Calon legislator muda yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki ilmu dibidang politik tidak mudah menarik simpati dari masyarakat dan menjadi kendala terbesar dalam membangun strategi komunikasi kemenangan dalam Pemilu.

Saputra (2023) dalam penelitiannya: Strategi Calon Legislatif Milenial DPRD DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2019, menyatakan jika tidak semua calon legislator milenial (muda) dalam merencanakan strategi politiknya menerapkan strategi politik yang bersifat ofensif dan defensif, sehingga mereka

tidak terpilih menjadi anggota legislatif karena kurang mendapatkan dukungan masyarakat.

Artikel ilmiah ini mengulas strategi komunikasi calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Analisis dan hasil diperoleh dari pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsi, dan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 agar mendapatkan legitimasi masyarakat. Sedangkan manfaat penelitian ini berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sosial politik serta sebagai referensi strategi komunikasi dalam meningkatkan citra diri yang berdampak pada legitimasi dari masyarakat.

METODE

Peneliti menguraikan dengan rinci metode yang digunakan pada penelitian strategi komunikasi calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Peneliti mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell dalam Priyanto & Noviana, 2023). Jenis penelitiannya adalah studi kasus, agar peneliti dapat memahami strategi komunikasi calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 secara intensif dan komprehensif. Peneliti membatasi istilah muda dalam perspektif usia, yaitu berkisar antara usia 17 hingga 30 tahun.

Penggunaan metode kualitatif karena bisa menghasilkan hipotesis dan memberi gambaran tentang fenomena yang diteliti selain mengumpulkan data yang lebih rinci, khususnya mencapai tujuan penelitian untuk memperoleh informasi strategi komunikasi calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, berdasarkan aspek: sumber, pesan, saluran atau media, sasaran, dan efek komunikasi. Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat mengungkap situasi dan tantangan yang dihadapi calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, karena hingga periode 2019-2024, DPRD Kabupaten Banyuwangi di dominasi oleh politisi tua, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan maksimal oleh masyarakat muda. Selain itu keberadaan pemuda yang diajukan sebagai calon legislator tidak menempati nomor utama, yaitu nomor 1 dan nomor 2, tetapi nomor pelengkap yaitu nomor 3 seterusnya, kecuali bagi pemuda yang menempati posisi penting pada Partai Politik (Parpol). Penelitian ini dilakukan semenjak tahun 2023 hingga tahun 2024.

Metode Penentuan Informan

Peneliti mempedomani metode purposive sampling dalam menetapkan informan, yaitu memiliki kesesuaian pada situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong dalam Cahyanti, et al., 2023). Meskipun penentuan informan berpijak dari pertimbangan tertentu, Priyanto (dalam Pratiwi, et al., 2024) memberi batasan kriteria informan, yaitu: berusia antara 17 hingga 65 tahun dan tidak pikun

sehingga mampu memberikan informasi berupa data yang representatif, tidak cacat bicara, berpendidikan paling rendah setingkat SD, bisa diajak komunikasi, mau menjadi informan, jujur, dan tidak dikucilkan oleh masyarakat disekitarnya, mengetahui hal-hal yang sedang di teliti.

Berdasarkan prinsip purposive sampling, terpilih: I Made Cahyana Negara sebagai unsur pimpinan Partai Politik, Enot Sugiharto, sebagai unsur penyelenggara Pemilu, Fahira Humaira sebagai unsur Calon legislator muda gagal terpilih, Pramudita Maharani Saputri sebagai unsur Calon legislator muda terpilih, dan Adhen Eko Hariyadi sebagai unsur pengamat politik.

Metode Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan berpedoman dari pedoman wawancara, catatan hasil observasi, dan dokumen yang sesuai. Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dalam hal data primer, peneliti memperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara. Data tersebut diperoleh berdasarkan prinsip wawancara bebas terpimpin terhadap informan yang telah ditetapkan, dengan pedoman wawancara yang disiapkan sebelumnya.

Data penelitian yang bersumber dari data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat orang lain dan bermanfaat sebagai penunjang dari data primer, dari studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian (Pitaloka, et al., 2023).

Data dikumpulkan peneliti untuk digunakan menguji teori, dan memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti berpijak pada observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sesuai jenis penelitiannya, peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data terkumpul, diolah dan di analisa dengan memberi penafsiran berupa uraian. Adapun sistematika peneliti disesuaikan dengan teori Miles dan Huberman (dalam Safinah, et al., 2024), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan Kesimpulan.

Metode Validitas Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur (Ramadan, et al., 2024). Keabsahan data dijamin melalui prinsip triangulasi yang terbagi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Hal tersebut agar menjamin keakuratan dan kebenaran data yang di dapat dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana strategi komunikasi calon legislator muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Teknik validitas data yang digunakan juga menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Pertanggung jawaban terhadap keabsahan data untuk membuktikan jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data peneliti yang telah diperoleh dari hasil penelitian (Putri, et al., 2024). Terkait hal tersebut, peneliti berpedoman pada prinsip: credibility, transferability, dependability, dan

confirmability. Prinsip tersebut penting dilakukan agar membantu mengidentifikasi potensi bias dan meminimalkan risiko kesalahan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Sumber Komunikasi

Orang yang mengirimkan pesan ke penerima disebut komunikator (Lasswell dalam Kurniawan, 2018). Calon legislator merupakan komunikator. Keberadaan calon legislator di usulkan oleh Parpol dan di tetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu.

Tabel 4. Daftar Calon Legislatif Tetap DPRD Kab. Banyuwangi Pada Pemilu Tahun 2019

Keterangan	Jumlah DCT	Daftar Calon Tetap (DCT)		Usia	
		L	P	17-30	31 ke atas
Total	601	373	228	98	503
Prosentase (%)	100%	62%	38%	16%	84%

Sumber: Sumber: KPU Kabupaten Banyuwangi (2023)

Sebagaimana data KPU Kabupaten Banyuwangi, jumlah calon legislatif muda pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan 7% pada Pemilu 2024, sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Calon Legislatif Tetap DPRD Kab. Banyuwangi Pada Pemilu Tahun 2024

No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah DCT	Daftar Calon Tetap (DCT)		Usia	
			L	P	17-30	31 ke atas
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	31	19	9	41
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	31	19	10	40
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50	27	23	13	37
4	Partai Golongan Karya	50	32	18	7	43
5	Partai NasDem	50	32	18	8	42
6	Partai Buruh	8	6	2	4	4
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	26	18	8	1	25
8	Partai Keadilan Sejahtera	50	31	19	6	44
9	Partai Kebangkitan Nusantara	17	8	9	3	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	50	31	19	8	42
12	Partai Amanat Nasional	41	25	16	13	28
13	Partai Bulan Bintang	49	29	20	15	34
14	Partai Demokrat	50	30	20	19	31
15	Partai Solidaritas Indonesia	16	8	8	7	9
16	Partai Perindo	27	18	9	8	19
17	Partai Persatuan Pembangunan	49	33	16	15	34
24	Partai Ummat	17	12	5	3	14
Jumlah Daftar Caleg Tetap		650	402	248	149	501
Prosentase (%)		100%	62%	38%	23%	77%

Sumber: Sumber: KPU Kabupaten Banyuwangi (2023)

I Made Cahyana Negara, Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan selaku informan dari unsur pimpinan Partai Politik, menyatakan: “Di

partai kami, ada mekanisme yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dalam penempatan nomor urut calon legaslatif. Saya hanya bertindak sebagai pelaksana apapun keputusan DPP PDI Perjuangan.” (Hasil wawancara, Januari 2024).

Informan Enot Sugiharto, Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, mengatakan: “Ada tahapan dalam Pemilu, diantaranya pendaftaran Parpol dan pengusulan calon legislatifnya. Dalam hal itu, kami berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023.”

Informan Negara, Ketua PDI Perjuangan selaku informan dari unsur pimpinan Partai Politik, menyatakan: “Siapapun boleh menjadi calon legislator, yang penting memenuhi syarat. Jikapun yang di bahas tentang kemampuan komunikasi, saya rasa itu berangkat dari kemauan untuk belajar memahami kondisi lapangan dan mendengar keinginan masyarakat.” (Hasil wawancara, Februari 2024).

Pemilu merupakan sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara (Priyanto, 2017). Sesuai pendapat tersebut, setiap calon legislator harus mempunyai berbagai dukungan, selain kecukupan logistik, juga harus mempunyai strategi komunikasi politik. Penempatan istilah strategi karena dalam kontestasi politik terdapat berbagai tantangan dalam meraih dukungan masyarakat. Oleh karenanya calon legislator muda harus memiliki kualitas mumpuni.

Informan Fahira Humaira, salah satu calon legislator muda dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Banyuwangi 6, menyampaikan: “Calon legislator muda banyak tantangannya. Pengalaman saya saat berkampanye, dianggap lemah dalam pemahaman politik dan komunikasi. Padahal sebelum mendaftar sebagai calon legislator, saya terus belajar dan aktif dalam kegiatan kepartaian.” (Hasil wawancara, Desember 2023).

Perspektif Pesan Komunikasi

Calon legislator muda berkepentingan agar komunikasi politiknya berhasil. Dalam meraih keberhasilan tujuan komunikasi, komunikasikan wajib memahami arti pesan komunikator serta memperhatikan dan menerima pesan secara menyeluruh (Priyanto, 2024). Informan Negara, Ketua PDI Perjuangan selaku informan dari unsur pimpinan Partai Politik, menyatakan: “Setiap calon legislator harus bertanggung jawab atas semua aktivitas komunikasi. Jika komunikasi politiknya tidak berjalan baik maka harus bertanggung jawab memperbaiki.” (Hasil wawancara, April 2024).

Sejalan dengan pikiran Negara, Informan Humaira, salah satu calon legislator muda dari Partai Golkar Dapil Banyuwangi 6, menyampaikan: “Calon legislator pasti menjadi sumber penting untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Tentunya, komunikasi yang saya lakukan harus dengan memahami situasi dan kondisi masyarakat agar tujuan saya dapat diterima mereka.” (Hasil wawancara, Mei 2024)

Hakekat strategi komunikasi politik merupakan penentu keberhasilan. Agar mencapai efektivitas, strategi komunikasi harus mempertimbangkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang mungkin dihadapi di masa depan (Firmanzah (2012); Arifin (2014)). Dalam menggunakan model komunikasi, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat

sehingga dengan mudah tersampaikan.

Informan Adhen Eko Hariyadi, pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, menjelaskan: “Tugas awal calon legislator muda memancing kepercayaan masyarakat. Sebab mereka dianggap lemah dari segi bahasa, intonasinya, dan materi politik yang ia bawa. Calon legislator muda harus memahami jika perbedaan era menjadi penyebab terbentuknya jurang pemisah antara pola komunikasi kelompok muda dan kelompok tua.” (Hasil wawancara, Desember 2023).

Informan Humaira, salah satu calon legislator muda dari Partai Golkar Dapil Banyuwangi 6, menyampaikan: “Kondisi lapangan memang tidak semudah apa yang saya bayangkan. Orang muda cenderung kritis dan ingin bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Tetapi fenomena “NPWP” (*nomor piro wani piro*-nomor berapa berani berapa) yang ditempatkan sebagai “tiket” agar di dukung masyarakat, tentu ini bertentangan dengan nurani saya.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Sependapat dengan penyampaian Humaira, Pramudita Maharani Saputri salah satu calon legislator muda dari PDI Perjuangan Dapil Banyuwangi 1, mengatakan: “Untuk menjadi anggota DPRD Banyuwangi ini sangat boros. Masyarakat pemilih tanpa segan meminta imbalan untuk suaranya. Jika tidak dituruti, mengancam memindahkan pilihannya. Maka mau tidak mau, saya menuruti permintaan dana untuk para pemilih.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Realitas sebagaimana disampaikan Humaira dan Saputri tersebut merupakan model patologi dalam politik, yang biasa disebut *money politic*. Setiap niat baik dalam politik tidak berarti terbebas dari masalah. Oleh karenanya pengawasan dan evaluasi pada tiap fenomena masyarakat merupakan hal penting (Priyanto, et al., 2021)

Informan Hariyadi selaku pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, mengemukakan: “Politik harus bermartabat. Politisi tua dan yang muda tidak boleh melakukan pelanggaran, termasuk dengan pemlesetan akronim “NPWP.” Justru tugas penting tiap politisi itu memberikan pembelajaran politik yang benar. Agar masyarakat percaya, politisi juga harus memberi contoh yang benar.” (Hasil wawancara, Mei 2024).

Perspektif Saluran Atau Media Pendukung

Menciptakan citra yang positif di mata masyarakat perlu menggunakan strategi seperti melakukan kampanye politik yang meriah di berbagai wilayah dan melakukan promosi murni, yaitu mempopulerkan diri melalui aktivitas sosial yang alami, seperti perayaan nasional dan acara pernikahan adat sambil menyelipkan pesan politiknya. Hal ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh calon legislator muda agar mendapat suara terbanyak sehingga mereka dapat menang dalam Pemilu Legislatif 2024.

Informan Hariyadi selaku pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, menyatakan: “Komunikasi itu bisa diterapkan oleh dan kepada siapa saja. Bedanya hanya model penyampaiannya. Jika penyampaiannya lewat media digital, flayer, baliho, pasti bisa diterima, yang penting tampilannya tidak bertentangan dengan norma dan etika yang berkembang di masyarakat.” (Hasil wawancara, Februari 2024).

Informan Humaira, salah satu calon legislator muda dari Partai Golkar Dapil

Banyuwangi 6, menyampaikan: “Alat peraga saya tersedia dalam berbagai media, baik melalui baliho, spanduk, kaos, maupun kalender, melalui sosial media, hingga pemberitaan media online.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Informan Sugiharto, Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, menyatakan: “Calon legislator boleh melakukan komunikasi politik atau kampanye, yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Mereka boleh memanfaatkan iklan politik di media massa, seperti televisi, surat kabar, majalah, dan radio, bersama dengan baliho dan spanduk agar dikenali di segenap sudut wilayah dapilnya.” (Hasil Wawancara, Juni 2024).

Saputri, salah satu calon legislator muda dari PDI Perjuangan Dapil Banyuwangi 1, mengatakan: “Saya memanfaatkan alat peraga sebagaimana aturan. Sebagai anak muda, desain kampanye saya murni gaya anak muda. Saat ada permintaan kaos olah raga, saya desain kaos itu dengan model karikatur.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Pasal 275 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kampanye Pemilu dilakukan melalui: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon, serta hal lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informan Hariyadi selaku pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, mengemukakan: “Media komunikasi sekarang tidak terbatas pada media massa yang punya berbagai ciri khas. Kehadiran internet sebagai alat komunikasi telah menghasilkan model media komunikasi kontemporer baru. Pemilihan media komunikasi yang tepat dan menjangkau masyarakat dengan tepat dan cepat adalah elemen penting dalam strategi komunikasi.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Perspektif Siapa Sasaran Atau Penerima Komunikasi Politik

Masyarakat adalah penentu keberhasilan. Setiap keberhasilan berangkat dari keefektifan komunikasi politik yang disampaikan oleh calon legislator muda kepada masyarakat. Interpretasi tersebut sebagai penjabar bahwa calon legislator muda harus memahami jika komunikasi politik yang berkaitan dengan pencitraan, perencanaan, tindakan komunikasi, dan elemen komunikasi tidak boleh dianggap sepele. Selain bisa menjadi penyebab keberhasilan, juga bisa menjadi penyebab kegagalan.

Informan Humaira, salah satu calon legislator muda dari Partai Golkar Dapil Banyuwangi 6, menyampaikan: “Sepengalaman saya, calon legislator muda kerap dianggap remeh, sehingga sulit mendapat kepercayaan maksimal dari masyarakat.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Dalam persepektif kepemimpinan, sangat penting mendapat legitimasi dari masyarakat. Legitimasi dari masyarakat merupakan suatu tahap yang harus dilalui dan dimiliki, yang akan mengantarkannya pada tahap memiliki otoritas (Weber dalam Sulhan & Lessy, 2022).

Berdasarkan hal tersebut keputusan atau tindakan dilakukan dengan cara yang adil, sah, dan sesuai dengan nilai-nilai serta kepentingan masyarakat. Setiap calon legislator muda berhak punya legitimasi personal yang harus mulai

dikembangkan pada dirinya sendiri sehingga dapat menambah reputasi, integritas, dan rekam jejak yang bisa menambah kepercayaan masyarakat.

Saputri, salah satu calon legislator muda dari PDI Perjuangan Dapil Banyuwangi 1, mengatakan: “Sebagai calon legislator, sasaran saya adalah pemilih tua dan pemilih muda. Saya berupaya keras meraih kepercayaan para pemilih melalui beragam komunikasi dan pendekatan lain. Tentang apakah saya dipilih mereka atau tidak, saya pasrahkan pada komitmen awal mereka ketika kebersamaan saya dalam berjuang.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Informan Hariyadi selaku pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, mengemukakan: “Realitas yang dihadapi calon legislator muda yang sulit mendapatkan legitimasi serta kepercayaan masyarakat itu jangan ditempatkan sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan.” (Hasil wawancara, Maret 2024).

Komunikasi dalam bentuk sosialisasi program yang direncanakan harus relevan menjawab masalah masyarakat (Sukma, et al., 2023). Seirama dengan pemikiran Hariyadi, informan Negara selaku Ketua PDI Perjuangan, menerangkan: “Tugas penting calon legislator muda itu harus memperhatikan kondisi lapangan. Tantangan mereka adalah menarik simpati serta dukungan dari para masyarakat. Intinya, lakukan komunikasi yang baik dan menarik. Kunci legitimasi politik adalah di terima, di dukung, dan di pilih masyarakat.” (Hasil wawancara, April 2024).

Langkah awal untuk menyampaikan komunikasi efektif adalah menentukan tema dan materi (Pratiwi, et al., 2021). Syarat utama agar komunikasi yang disampaikan dapat mempengaruhi masyarakat adalah berhasil membangkitkan perhatian. Informan Hariyadi selaku pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, menjelaskan: “calon legislator muda harus memperhatikan bahwa gagasan yang disampaikan dapat diterima dan tidak menyinggung masyarakat.” (Hasil wawancara, Juni 2024).

Perspektif Efek Komunikasi

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan (Lasswell dalam Perdana, 2021). Efek dari strategi komunikasi harus berdampak legitimasi, yang merupakan prosedur untuk dimiliki insan politik sehingga bisa mengantarkannya untuk memiliki otoritas. Menurut Weber (Shofi & Talkah, 2021), otoritas suatu kepemimpinan, baik yang bercorak profan atau religius, politik dan nonpolitik, pada umumnya didapat karena adanya legitimasi. Berbekal legitimasi, dengan demikian suatu kepemimpinan telah memiliki kartu pas untuk memainkan otoritas politiknya.

Masyarakat cenderung memiliki asumsi bahwa calon legislator muda belum teruji dalam hal memperhatikan kepentingan masyarakat. Informan Humaira, salah satu calon legislator muda dari Partai Golkar Dapil Banyuwangi 6, menyampaikan: “Sebenarnya saya berusaha menjadi pendengar yang baik terhadap segala arahan serta kemauan yang disampaikan konstituen saya yang memang rata-rata orang tua. Makanya desain kampanye saya itu konvensional. Namun saat berkomunikasi dengan konstituen yang dari kelompok muda, saya mendapat banyak kritikan karena dianggap segala alat peraga dan pola komunikasi kampanye saya tidak kekinian atau tidak mencerminkan anak-anak

muda.” (Hasil wawancara, Desember 2023).

Informan Hariyadi, pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, menjelaskan: “Pemuda itu memiliki keunikan, yang terkadang berbeda dengan kemauan orang-orang tua. Tapi saya yakin, jika bisa menyampaikan dengan baik, pasti bisa diterima. Contohnya model komunikasi inovatif berbasis digital.” (Hasil wawancara, Januari 2024). Komunikasi pada masyarakat berkaitan dengan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan, serta bisa memberi kepuasan masyarakat (Priyanto, 2018).

Saputri, salah satu calon legislator muda dari PDI Perjuangan Dapil Banyuwangi 1, mengatakan: “Untuk mendapat kepercayaan pemilih itu memang sulit. Banyak praduga ketidak mampuan yang kerap saya dengar. Meski begitu, saya tidak begitu kesulitan, mengingat keluarga saya adalah politisi dan bahkan ayah saya pernah menjabat sebagai Ketua PDI Perjuangan, Ketua DPRD Banyuwangi, dan saat ini masih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.” (Hasil wawancara, April 2024).

Informan Negara, Ketua PDI Perjuangan selaku informan dari unsur pimpinan Partai Politik, menyatakan: “Efek keberhasilan dalam politik itu hanya menang dan dilantik sebagai legislator terpilih.” (Hasil wawancara, Juni 2024).

Tabel 6. Daftar Calon Legislatif Terpilih DPRD Kab. Banyuwangi Dalam Pemilu Tahun 2024 Usia 17-30 Tahun

No	Nama Caleg	Nama Partai	Perolehan Suara	Daerah Pemilihan
1	Pramudita Maharani Saputri	PDI Perjuangan	6.064 suara	Dapil 1
2	Dimas Bayu Segara	Partai NasDem	7.953 suara	Dapil 3
3	Bagus Amerta Dewa	PDI Perjuangan	9.595 suara	Dapil 3
4	Dhea Sartika	PDI Perjuangan	7.031 suara	Dapil 4
5	M. Aghistni Maulana S	Partai NasDem	7.563 suara	Dapil 4
6	Andiko Putra Mahatta	PDI Perjuangan	7.543 suara	Dapil 5
7	Abdul Ghofur	Partai Gerindra	5.312 suara	Dapil 6
8	Fadhan Nur Arifin, SE	Partai Demokrat	7.886 suara	Dapil 6
9	Febry Prima Sanjaya	Partai NasDem	3.150 suara	Dapil 6
10	Asrila Diska Rimunda	Partai Gerindra	11.564 suara	Dapil 8

Sumber: Sumber: KPU Kabupaten Banyuwangi (2024)

Menyambung pernyataan Negara, informan Hariyadi, pengamat politik dari lembaga Media Karya Infotama, menjelaskan: “Komunikasi politik yang tidak baik atau tidak di terima masyarakat berdampak negatif pada suara Parpol dalam Pemilu.” (Hasil wawancara, Januari 2024).

Informan Sugiharto, Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, mengatakan: “Prinsip dalam kontestasi politik itu menang dan beruntung. Menang suara tapi partainya tidak mendapatkan kursi, maka itu tidak bisa disebut kemenangan dalam kontestasi elektoral. Sebab hakekat kemenangan itu beruntung menjadi bagian dari yang dilantik.” (Hasil wawancara, Juni 2024).

KESIMPULAN

Kualitas komunikasi politik yang tidak baik disebabkan pemahaman tidak mendalam. Pesan komunikasi politik untuk kemartabatan Pemilu berhadapan dengan *money politic*. Media penunjang tersedia dalam bentuk konvensional dan kontemporer. Keberhasilan komunikasi politik terukur dari penerimaan,



dukungan, dan menjadi pilihan masyarakat. Terdapat kontradiksi model komunikasi antara kelompok tua dan kelompok muda.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan: (1) Keharusan untuk belajar memahami kondisi lapangan dan mendengar keinginan masyarakat; (2) Perlu ketegasan dari semua pihak untuk menghentikan kebiasaan *money politic*; (3) Narasi dan desain dalam media penunjang tidak bertentangan dengan norma dan etika di masyarakat; (4) Kesulitan mendapat kepercayaan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai hambatan namun ditempatkan sebagai tantangan; dan (5) Perlu memahami jika komunikasi politik berimplikasi pada perolehan suara Parpol.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. (2014). *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cahyanti, S. R. D., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2023). Tata Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Peraturan Daerah 7/2020. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 156-167. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.974.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunanto, D., Andriyani, L., & Sahrul, M. (2021). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Terpilih DPRD Tangerang Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia). *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4 (2). Doi 10.24853/pk.4.2.131-136.
- Kurniawan, D. (2018). Komunikasi Model Lasswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2 (1), 60. Doi:10.32585/jkp.v2i1.65.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022, tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, tentang: Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Perdana, K. E. (2021). Analisa Model Komunikasi Lasswell Pada Halaman “@Aswaja_Sunda” Dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah Di Media Instagram. *The International Journal Of PEGON Islam Nusantara Civilization*, 5 (1).
- Pitaloka, N. R. A., Imaniar, D., & Priyanto, H. (2024). Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4 (02), 2745-4584.
- Pratiwi, S., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi Dalam Politik Lokal. *Jurnal Katarsis*, 1 (1).
- Pratiwi, N. E., Rahayu, S., & Priyanto, H. (2024). Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis Dan Pengamen Anak Di Kecamatan Banyuwangi. *Jurnal Katarsis*, 1 (2).
- Priyanto, H. (2017). Kebijakan Pemerintah Tentang pemilihan Umum Ditinjau



- Darisukses Pendidikan Politik dan Golongan Putih. *Jurnal Humaniora*, 14 (2): 89-93.
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7 (1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03.
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4 (4): 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15 (2): 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi District: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8 (1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Putri, Helma Anerga., Hary Priyanto, & Leni Vitasari. (2024). Performance Analysis Of Pamong Praja Police Units Regarding Incidental Advertising In Banyuwangi District. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 13 (1): 103-113. Doi: 10.36526/sosioedukasi.v13i1.3974.
- Ramadan, Iqbal., Hary Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2024). Bulurejo-Banyuwangi Village Fund Postulate As Supporting The Effectiveness Of Empowering Pre-Prosperous Communities (Postulat Dana Desa Bulurejo-Banyuwangi Sebagai Penunjang Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahtera). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8 (1). Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3973.
- Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8 (1): 458-465. Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3527.
- Saputra, Erwanda. (2023). *Strategi Calon Legislatif Milenial DPRD DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2019*. Jakarta: Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shofi, Ibnu., & Talkah. (2021). Analisis Teori Otoritas Max Weber Dalam Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah (Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan). *Jurnal Kependidikan Islam*, 11 (1). Doi: 0.15642/japi.2020.10.2.226-251.
- Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3 (6): 1870-1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.



- Sulhan, M., & Lessy, Zulkipli. (2022). Otoritas Dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4 (2): 2684-9437.
- Syahrudin., La Ode, M. N., & Menungsa, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilu 2019. *Japmas: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 1 (1): 44-52.
- Syamsuar, & Andini, M. R. (2020). Militansi Caleg Muda dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 4 (2). Doi 10.25139/jkp.v4i2.2466.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Yuniar, N., Rahayu, S., & Priyanto, H. (2024). Strategi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Banyuwangi; Studi Pada Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor: 660/412/429.104/2019. *Jurnal Katarsis*, 1 (2).

